



Media Title	Koran Tempo		
Head Line	Pembebasan Lahan JORR W2 Selesai Desember		
Date	23 November 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	26	Article Size	
Journalist	Nur Haryanto	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

# Pembebasan Lahan JORR W2 Selesai Desember

"Masak enggak percaya sama Jokowi."

Nur Haryanto  
anto@tempo.co.id

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji pembebasan lahan-proyek Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) rampung bulan depan. "Pekan depan, saya ajak ke sana," kata Joko Widodo saat ditemui di kantornya kemarin. Gubernur yang akrab dipanggil Jokowi ini mengatakan, penyelesaian pada Desember juga mencakup permasalahan pembebasan lahan dari warga yang menolak menjual lahannya untuk proyek di Petukangan Selatan. "Saya pastikan Desember rampung. Masak enggak percaya sama Jokowi," katanya.

Menurut dia, tawaran harga yang diberikan kepada warga sudah di atas nilai taksiran. "Sudah bukan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) lagi," kata Jokowi. Pada 13 November lalu, sebagian bidang tanah telah dibayar sebagai pembebasan lahan untuk proyek JORR W2 tersebut.

Pekan ini, sejumlah pekerja dan truk pengangkut material bahan jalan mulai tiba di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Mereka kembali beraktivitas di simpang Jalan M. Saidi, Petukangan Utara, untuk merampungkan proyek jalan tol yang sempat terhenti. "Diminta mulai kerja lagi dari minggu

kemarin," ujar Sakri, 32 tahun, salah satu pekerja.

Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Ambardy Effendy, membenarkan bahwa pembangunan proyek kembali dimulai. Kegiatan itu dilakukan dengan adanya kemajuan pembebasan lahan di wilayah ini yang tersendat hampir tiga tahun lalu.

Dari pantauan, jalan tol lingkaran luar ini berhenti di simpang layang Jalan Ciledug. Penyebabnya, ada sekitar 2 hektare lahan di Petukangan Utara yang belum dibebaskan. Warga meminta tanahnya dihargai Rp 14-16 juta per meter persegi. Sedangkan

pemerintah hanya sanggup membayar Rp 4-6 juta per meter persegi. "Memang harga tanah di sana segitu sesuai dengan *appraisal*," ujar Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Jakarta Selatan Tri Djoko Sri Margianto.

Tim Panitia Pengadaan Tanah Kota Jakarta Selatan telah mensurvei harga tanah di wilayah sekitar, dan temuannya memperkuat penilaian harga yang dilakukan tim independen sebelumnya. "Jadi, kami tak akan mengikuti kemauan warga. Kalau diikuti, nanti berapa harga tanah di Fatmawati untuk proyek MRT," ujar Tri.

Perwakilan warga, Tatang Sukirno, mengatakan akan mendebat pemerintah soal harga tanah. Salah satunya adalah menimbang kembali penetapan di tiga zonasi di wilayah Pesanggrahan yang dihargai kurang dari Rp 10 juta. Sedangkan warga berkukuh meminta harga di atas Rp 10 juta dengan alasan perbaikan kualitas hidup karena merasa jadi korban pengusuran. "Kami juga ingin cepat selesai, tapi aturannya harus ditegakkan," ujar pensiunan pegawai negeri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini.

● ISMI DAMAYANTI | M. ANDI PERDANA